

## **BAB IV**

### **ALASAN TINDAKAN AMERIKA SERIKAT MENAMBAH BANTUAN MILITER KE KOREA SELATAN TAHUN 2015**

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penulis dalam tulisan ini menggunakan teori Decision Making Process oleh William D. Coplin sebagai alat untuk menjelaskan fenomena yang ada dalam tulisan tersebut. Pada bab I, menjelaskan apa saja bantuan militer diberikan oleh Amerika Serikat kepada Korea Selatan dalam 10 tahun terakhir. Kemudian dari bab II dan III dijelaskan bahwa sejarah hubungan bilateral antara Amerika Serikat dengan Korea Selatan sudah berlangsung sejak 60 tahun yang lalu dan hubungan tersebut dilandasi oleh kerjasama militer yang terjalin sejak Perang Korea (1950-1953), yang lalu pada era kePresidenan Barack Obama arah hubungan tersebut mulai dirubah sebagai suatu jalan pembaharuan dengan ada KORUS FTA dan OPCON.

Korea Selatan merupakan negara yang terbentuk karena pembagian Korea oleh Uni Soviet dengan Amerika Serikat, dimana bagian utara dikuasai oleh Uni Soviet sedangkan bagian Selatan di pegang oleh Amerika Serikat setelah membebaskan Korea dari penjajahan Jepang. Dan selama lebih dari 60 tahun tersebut, Korea Selatan dan Korea Utara belum menunjukkan tanda-tanda berakhirnya perselisihan. Di tahun 2015, Barack Obama selaku Presiden Amerika Serikat pada waktu itu, menganggarkan biaya lebih untuk bantuan militer Korea Selatan dan hal tersebut memberikan pertanyaan: Mengapa Barack Obama menaikkan anggaran bantuan militer ke Korea Selatan di tahun 2015? Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan mengapa hal tersebut dapat terjadi dimana setiap tahunnya kenaikan anggaran militer Amerika Serikat untuk bantuan di Korea Selatan tidak terlalu signifikan. Dan seperti yang sudah dijelaskan dari bab I pada bagian kerangka pemikiran, menurut William D. Coplin ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan dalam membuat suatu

kebijakan luar negeri pada suatu negara, yakni *domestic politics*, *economic/military condition*, serta *international context*.

Dan melalui bab ini, penulis akan memeriksa fenomena tersebut dengan teori *Decision Making Process* oleh William D. Coplin sebagai membuktikan hipotesis dalam tesis sarjana ini. Hipotesis tersebut akan dijelaskan secara menyeluruh dan sedetil mungkin.

## **A. Domestic Politic**

Pada dasarnya semua kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional (*national interest*) agar dapat bersaing dengan negara-negara lain di dunia internasional. Kerjasama militer dengan suatu negara merupakan salah satu bentuk dari kebijakan luar negeri yang diberlakukan oleh pemerintahan suatu negara. Kebijakan luar negeri dapat dipengaruhi beberapa hal yang salah satunya adalah *domestic politic*. Seperti yang dikatakan oleh William D. Coplin, suatu kebijakan luar negeri dapat dipengaruhi beberapa hal yang salah satunya adalah *domestic politic* yang berarti dalam bahasan ini adalah US Congress dan Media Masa.

### 1) US Congress (Kongres Amerika Serikat)

Kongres adalah suatu badan legislatif yang pertama kali disebut dalam konstitusi Amerika Serikat. Sekalipun sistem pemerintahan Amerika Serikat dikenal sebagai sistem Presidensiil dan bukan sistem parlementer sebagaimana di negara-negara Benua Eropa, tetapi Kongres Amerika Serikat mendapatkan porsi wewenang dalam membuat kebijakan publik jauh lebih banyak dibandingkan dengan Presiden (Cipto, 2003). Kongres terdiri dari dua bagian, yakni Senate dan House of Representatives yang dimana Senator merupakan anggota dari Senate yang menjadi perwakilan suatu negara bagian di Amerika Serikat, sedangkan House of Representatives merupakan badan perwakilan penduduk negara bagian (Cipto, 2003).

Kongres Amerika Serikat memiliki tugas yaitu sebagai pembuat kebijakan, pengawas pelaksanaan Undang-undang dan kebijakan, serta sebagai perwakilan dari masyarakat Amerika Serikat. Kongres memiliki wewenang lebih untuk mengesahkan suatu kebijakan, yang dimana seorang Presiden

harus meminta persetujuan dari Kongres agar kebijakan yang diajukan Presiden dapat disahkan. Dalam beberapa tahun terakhir, Kongres Amerika Serikat mulai menaruh perhatian pada Korea Utara yang memulai pengembangan senjata nuklir. Pada tanggal 5 maret 2013, House Foreign Affairs Committee memperoleh keterangan bahwa Korea Utara membiayai pengembangan senjata nuklir di Iran dan Suriah yang dimana Amerika Serikat pada waktu tersebut meminta bantuan Tiongkok untuk mengatasi aktivitas Korea Utara yang berbahaya. Tidak hanya itu, Sung-Yoon Lee dari Tufts University mengatakan bahwa Korea Utara semakin tidak terkendali karena mendapat bantuan juga dari Korea Selatan karena Sunshine Policy berupa uang, makanan, dan bantuan lain sebesar US\$ 10 milyar selama 10 tahun terakhir (Chapman, 2016).

Selaku Presiden Amerika Serikat, Barack Obama demi mempertahankan hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dengan Korea Selatan, pasti akan langsung membantu masalah tersebut karena Korea Selatan merupakan partner dengan potensi besar di samping kenyataan bahwa Amerika Serikat dengan Korea Selatan sudah beraliansi sejak tahun 1950. Akan tetapi, hal tersebut menjadi rumit ketika harus meminta persetujuan dari Kongres, karena dalam proses pembuatan Undang-undang atau kebijakan di Amerika Serikat, Presiden harus mendapatkan persetujuan dari Kongres agar suatu kebijakan dapat dilaksanakan. Sebelum disepakati pelaksanaan OPCON, Kongres Amerika Serikat menentang keputusan tersebut karena OPCON dapat menyebabkan berkurangnya dukungan Kongres dan publik Amerika Serikat untuk mempertahankan kehadiran militer di Semenanjung Korea (Klingner, 2009). Dengan tidak adanya misi yang jelas diartikulasikan setelah transfer, pertanyaan tentang peran pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan dapat menyebabkan panggilan untuk penarikan pasukan Amerika Serikat yang lebih besar.

Transfer perintah operasional mengharuskan Korea Selatan untuk menerapkan serangkaian perbaikan pada pasukan militer Korea Selatan dan meskipun tidak sepenuhnya identik dengan South Korea's defense Reform 2020, program tersebut memberikan metrik untuk menilai kemajuan dalam melaksanakan program pertahanan yang diperlukan (Chapman, 2016). Rencana modernisasi militer

terbilang yang ambisius tersebut adalah untuk mengembangkan kekuatan pertahanan yang lebih kecil yang berorientasi teknologi dengan meningkatkan teknologi, komando sistem kontrol, dan pengadaan senjata yang lebih mampu.

Kekurangan pendanaan telah menunda program ini selama lima tahun serta ketidakmampuan atau keengganan Korea Selatan untuk mendanai persyaratan militernya menimbulkan kekhawatiran Amerika Serikat atas keputusan Korea Selatan dalam memenuhi kewajiban aliansinya. Menunda keputusan transfer OPCON saat itu akan dilihat oleh Amerika Serikat sebagai penghilangan katalis yang diperlukan bagi Korea Selatan untuk mempertahankan komitmennya untuk mengerahkan pasukan yang diperlukan untuk mengambil alih komando masa perang. Advokasi Korea Selatan untuk membalikkan keputusan juga berisiko mempertanyakan janji Amerika Serikat untuk membela sekutunya. Para pejabat Amerika Serikat telah berulang kali menegaskan komitmen yang tak tergoyahkan untuk membela Korea Selatan, dalam hal ini Amerika Serikat telah menekankan bahwa pasukan Amerika Serikat akan tetap di angka 28.500 yang menetap Korea Selatan (Chapman, 2016).

Menurut William D. Coplin, dalam suatu kebijakan luar negeri, politik dalam negeri termasuk faktor yang mempengaruhi hal tersebut, apabila di pilah dalam politik dalam negeri ada beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain: Birokrat, Partai Politik, Kepentingan, dan Massa (Coplin, 2003). Dalam kasus ini, Barack Obama selaku Presiden Amerika Serikat seperti yang dijelaskan sebelumnya tidak memiliki kekuatan penuh untuk dengan mudahnya mengesakan suatu kebijakan luar negeri. Kongres Amerika Serikat merupakan birokrat dalam faktor yang dijelaskan William D. Coplin, yang dimana merupakan hasil dari kompleksnya suatu pemerintah di negara yang sudah tergolong modern, maka wajar saja apabila di negara modern tersebut banyak terbentuk organisasi-organisasi yang berskala luas sebagai bagian dari lembaga eksekutif. Kongres di sistem pemerintahan Amerika Serikat memiliki akses langsung kepada pengambil keputusan alias Presiden karena di sistem pemerintahan Amerika Serikat, Presiden bergantung kepada Kongres dalam hal informasi-informasi yang penting bagi pembuatan kebijakan serta dalam bantuan untuk untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam hal ini, Kongres

yang telah mengerti mengenai konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara yang sudah berlangsung selama 50 tahun lebih dan menilai hal seperti menambah alokasi dan militer untuk membantu Korea Selatan dianggap tidak perlu.

Menurut William D. Coplin, kelompok-kelompok birokratis sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan dikarenakan kelompok-kelompok tersebut menyalurkan informasi kepada pengambil keputusan dan kemudian melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pengambil keputusan (Coplin, 2003). Kongres bertanggung jawab untuk menyetujui undang-undang baru, merevisi legislasi yang ada, pendanaan program pemerintah, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja program-program pemerintah; maka sangat penting bagi Barack Obama selaku Presiden Amerika Serikat mendengarkan informasi-informasi yang disampaikan oleh Kongres Amerika Serikat agar mampu memahami keamanan domestik (Amerika Serikat) maupun mancanegara (Korea Selatan). Dalam proses pengambilan keputusan, Kongres memiliki lembaga yang berperan sebagai pembantu agar dapat mempersiapkan laporan-laporan untuk Kongres yang dinilai memberatkan mereka, hal tersebut sudah menjadi tugas pengawasan yang dimiliki lembaga tersebut untuk Kongres. Sebagai contoh, laporan yang diamanatkan Kongres Amerika Serikat tentang topik-topik Korea Selatan untuk Kongres ke-113 termasuk satu tentang mengurangi ancaman rudal balistik jarak jauh Korea Utara, di dalamnya memiliki pernyataan yang salah satunya yaitu memastikan bahwa dana program pengembangan energi Semenanjung Korea tidak digunakan untuk pengembangan senjata nuklir Korea Utara serta hambatan tarif dan non-tarif dikenakan oleh Korea Selatan pada ekspor Amerika Serikat (Chapman, 2016).

Dalam sidang tersebut, Kongres yang membahas perdebatan di Semenanjung Korea selama Kongres 113 (2013-2014) merupakan suatu cara untuk memeriksa pentingnya wilayah ini (Korea Selatan) demi kepentingan ekonomi, geopolitik, dan strategis ke Amerika Serikat. Beberapa sidang komite Kongres Peninsula diadakan setiap tahun seperti permintaan anggaran militer departemen untuk PACOM (*Pacific Command*) termasuk Korea Selatan dan USFK (*U.S. Forces Korea*).

Dengan kata lain, Kongres Amerika Serikat memberi informasi tentang konflik tersebut kepada Barack Obama yang dimana akan mempengaruhi hasil akhir keputusan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan untuk konflik Korea Selatan dan Korea Utara. Pada dasarnya, Kongres selaku *bureaucratic influencers* dalam teori ini tidak bisa secara terbuka menentang kebijakan-kebijakan yang di ambil kecuali melalui jalur-jalur yang tersedia (Coplin, 2003). Sehingga, wajar apabila dalam kasus ini Barack Obama dalam mengajukan kebijakan tersebut bisa tidak sepemikiran atau bahkan tidak disetujui oleh Kongres itu sendiri.

## 2) Media Massa

Seperti yang kita semua ketahui, bahwa media masa merupakan salah satu sarana politik dan diplomasi yang efektif karena setiap harinya masyarakat modern pasti menggunakan sarana tersebut demi mengetahui sebuah informasi. Setiap negara menggunakan media masa sebagai alat untuk mengendalikan opini masyarakat tidak terkecuali Amerika Serikat yang menggunakan media masa sebagai alat untuk memperoleh dukungan dari masyarakatnya dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan. Menurut William D. Coplin, dalam suatu kebijakan luar negeri opini publik diperlukan untuk merasionalkan kebijakan tersebut sehingga dalam pelaksanaannya kebijakan luar negeri tersebut memperoleh dukungan dari masyarakat (Coplin, 2003). Dalam kasus ini, ketika Barack Obama menjabat menjadi Presiden Amerika Serikat setelah memenangkan Pemilu, salah satu hal pertama yang dilakukan Barack Obama adalah memperbaiki hubungan bilateral dengan Korea Selatan.

Mengapa demikian, karena ketika pada era George W. Bush, hubungan antara Amerika Serikat dengan Korea Selatan sempat tegang karena Sunshine Policy yang diberlakukan oleh Kim Dae-Jung sebagai upaya membujuk Korea Utara agar berdamai kemudian bersatu dengan Korea Selatan. Masyarakat Amerika Serikat cenderung menganggap tindakan George W. Bush sebagai sesuatu yang ekstrim dan hanya menyebabkan perang semakin berlanjut, sehingga Barack Obama dalam kebijakannya sebagian besar dalam bentuk pembentukan kembali hubungan-hubungan dengan negara sahabat Amerika Serikat yang sempat rusak salah satunya adalah Korea Selatan yang karena dianggap membantu Korea

Utara dalam pembuatan senjata nuklir. Ketika Barack Obama menjadi Presiden kulit hitam pertama di Amerika Serikat, dari radio, surat kabar, hingga TV memuji Barack Obama karena latar belakangnya yang bukan darah biru politikus dan visi misinya untuk dunia yang damai dan tanpa memandang ras maupun agama.

Agar Amerika Serikat dapat memperoleh kembali kerjasama dari Korea Selatan, Barack Obama mengeluarkan kebijakan untuk menambah anggaran bantuan militer ke Korea Selatan di samping wilayah Timur Tengah. Salah satunya dengan peremuannya dengan Presiden Korea Selatan pada waktu itu, Park Geun-Hye dalam rangka pertemuan KTT G20 di Hangzhou, Tiongkok dimana Barack Obama dengan Park Geun-Hye membahas soal pembaharuan kerjasama ekonomi dan militernya (Defense, 2016). Tindakan tersebut disiarkan melalui TV, internet, surat kabar, dan media lainnya sebagai bukti agar masyarakat Amerika Serikat mendukung kebijakan luar negeri yang dikeluarkan Barack Obama. Kebijakan luar negeri Barack Obama juga tidak lepas dari latar belakangnya yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi setiap kebijakannya sehingga media masa menjadi alat efektif untuk meyakinkan massa bahwa kebijakan luar negeri yang dikeluarkannya itu benar. Selama 8 tahun berkuasa, Barack Obama di mata masyarakat Amerika Serikat dan dunia dianggap sebagai seorang pemimpin yang mampu mempersatukan banyak ras untuk hidup dalam keharmonisan tanpa perlu melihat warna kulit dan sebagainya.

Salah satu program dari Barack Obama yang menyebabkan ada dukungan dari banyak orang di Amerika Serikat adalah The Obama Health Care Plan atau Obama Care Plan yang merupakan sebuah program yang direncanakan sebagai reformasi pelayanan kesehatan baru di Amerika Serikat yang diresmikan oleh Barack Obama pada tanggal 23 Maret 2010 (DeMichele, 2012). Dari program tersebut, masyarakat semakin yakin bahwa Barack Obama adalah pemimpin yang mereka butuhkan dan ketika Korea Utara melakukan program uji coba senjatanya di Semenanjung Korea, baik masyarakat Amerika maupun Korea Selatan yang telah mengerti seperti apa Barack Obama melalui program-program serta kebijakannya dari media masa, percaya akan kemampuannya. Dari OPCON protokol, Barack Obama

berencana untuk menarik sebagian besar pasukan Amerika Serikat yang ada di Korea Selatan agar para tentara dapat berkumpul dengan keluarganya. Di mata masyarakat Amerika Serikat, hal tersebut diperlukan karena sudah berapa lama para tentara tersebut jauh dari keluarganya di Amerika Serikat.

## **B. Economy/Military Condition**

Suatu negara dikatakan telah maju apabila mampu memenuhi segala kebutuhan warga negaranya di kehidupan sehari-hari. Dalam mewujudkan hal tersebut, wajar saja bila suatu negara akan membuka diri kepada negara lain untuk melakukan suatu kerjasama dan saling bertransaksi dengan melalui sumber daya alam masing-masing negara. Dan yang menjadi tolak ukur kekayaan suatu negara diukur menggunakan GNP (Gross National Product) untuk mengukur nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam waktu satu tahun. Karena angka-angka dari GNP dapat dikonversi menjadi standar mata uang tunggal dan dapat digunakan untuk membandingkan kekayaan suatu negara dengan kekayaan negara lain, kadang hal tersebut dapat menjadi masalah karena perbedaan nilai mata uang dari masing-masing negara yang berbeda. Selain itu, GNP secara umum tidak bisa digunakan sebagai ukuran pasti kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakatnya. Menurut William D. Coplin, indikator yang lebih berguna untuk mengukur kekayaan relatif tersebut adalah melalui GNP per kapita yang pada bagian indikator penyajian gagasan yang lebih baik tentang apakah jumlah absolut barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara memenuhi permintaan rakyatnya atau tidak (Coplin, 2003). Dalam kasus ini, Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir telah memberlakukan KORUS FTA (United States-Korea Free Trade Agreement) dengan Korea Selatan sebagai jalan baru dalam hubungan diplomatik mereka.

Dari tahun 2009-2016, GNP Amerika Serikat mencapai US\$ 18,6 juta dan di tahun yang sama GNP Korea Selatan mencapai US\$ 1,4 juta (Bank, 2018). Dengan perbedaan seperti itu wajar saja bila Korea Selatan akan membutuhkan bantuan Amerika Serikat dalam hal ekonomi maupun militer. Kekuatan militer di setiap negara memiliki pengaruh signifikan terhadap kekuatan negara yang sedang tumbuh dan peran mereka tidak hanya di tingkat internasional, tetapi juga di tingkat nasional. Meski



tugas utama kekuatan militer adalah melindungi negara terhadap serangan dari negara lain, jika perlu militer dapat bertindak sebagai pengambil keputusan dalam keadaan perang. Peran utama pasukan militer adalah untuk mencegah munculnya gejolak sosial dan politik yang mengancam pemerintah yang ada atau menyebabkan kehancuran. Peran pasukan militer di tingkat domestik adalah pemanfaatan pasukan ketika bencana alam terjadi, tetapi tetap saja, peran utama pasukan militer adalah untuk menekan kekerasan di dalam negeri. Dalam kasus ini ketika ancaman Korea Utara masih berlangsung, yang bertugas dalam menghadapi hal tersebut jika terjadi perang adalah pasukan gabungan Amerika Serikat dengan Korea Selatan.

Akan tetapi, biaya peralatan militer yang ditawarkan Amerika Serikat meningkat setiap tahunnya dan Korea Selatan semakin khawatir tidak akan mampu membiayai peralatan tersebut. Barack Obama mengajukan peresmian KORUS FTA ke Kongres agar Korea Selatan tetap membeli peralatan militer Amerika Serikat. Pada awalnya Kongres Amerika Serikat sempat ragu terhadap KORUS FTA karena akan mengurangi pemasukan Amerika Serikat karena menghilangkan tarif dalam keluar masuknya barang di Amerika Serikat terutama barang-barang militer yang menjadi salah satu sumber pemasukan Amerika Serikat. Kesepakatan dengan Korea Selatan memiliki potensi untuk menciptakan sebanyak 280.000 pekerjaan di Amerika, menurut penilaian baru-baru ini oleh staf Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat, dan untuk meningkatkan ekspor lebih dari US\$ 12 milyar (Goldfarb & Montgomery, 2011). Akan tetapi beberapa serikat pekerja utama telah memperingatkan bahwa setiap keuntungan akan datang dengan biaya PHK di antara pekerja Amerika Serikat karena persaingan yang tinggi dari impor Korea Selatan.

House of Representatives menyetujui kesepakatan tersebut dan dengan cepat diikuti oleh Senat. Persetujuan akhir dari perjanjian tersebut merupakan kemenangan bagi pemerintahan Barack Obama dan para pemimpin kongres di kedua belah pihak, yang telah menggembar-gemborkan pakta perdagangan sebagai sarana untuk melejitkan ekonomi lesu tanpa tambahan belanja pemerintah. Ratifikasi perjanjian memegang peranan penting bagi Presiden Barack Obama, yang telah menetapkan tujuan menggandakan

ekspor AS pada tahun 2015 dan menghadapi tawaran sulit untuk pemilihan kembali dengan pengangguran terjebak pada 9.1% (Goldfarb & Montgomery, 2011). Dari hal tersebut, ekspor senjata Amerika Serikat ke Korea Selatan tidak akan terkena tarif dari negara tersebut yang secara perlahan pasukan Amerika Serikat yang bertugas di Korea Selatan dapat di tarik kembali secara perlahan. Sebagai gantinya, kesepakatan dagang seperti KORUS FTA dapat diberlakukan dapat memberi keuntungan kepada masing-masing negara.

Pada tanggal 6 September 2015, Barack Obama bertemu dengan Presiden Korea Selatan saat itu Park Geun-hye pada pertemuan G20 Summit di Laos (House, 2016). Ketika menghadiri pertemuan puncak regional hari ini di Vientiane, Laos, Presiden Barack Obama dan Presiden Korea Selatan Park Geun-hye menegaskan kembali aliansi lama negara mereka dan mengutuk program nuklir Korea Utara dan peluncuran rudal, menurut pemberitaan dari Gedung Putih. Barack Obama menghadiri pertemuan puncak PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Laos sebagai bagian dari perjalanannya di Asia, yang termasuk pemberhentian sebelumnya di Tiongkok untuk menghadiri KTT G-20. Setelah pertemuan bilateral dengan Korea Selatan, Barack Obama mengatakan senang bertemu dengan Park Geun-hye dan delegasinya. Korea Selatan, tambahnya, adalah salah satu sekutu tertua dan terdekat dengan Amerika Serikat. Aliansi tersebut katanya, tetap menjadi tonggak utama perdamaian dan keamanan, yang tidak hanya di Semenanjung Korea, tetapi juga di seluruh wilayah Korea.

Dalam sidang Kongres Amerika Serikat yang ke-113, difokuskan pada berbagai aspek positif dan gangguan-gangguan hubungan bilateral Amerika Serikat dan Korea Selatan. Kebijakan ekonomi dan perdagangan juga merupakan faktor yang sangat penting dalam hubungan bilateral kedua negara tersebut dan juga merupakan topik sentral di dalam setiap sidang Kongres ketika dimintai pendapat tentang hubungan Amerika Serikat dengan Korea Selatan. Terutama kemajuan ekspor impor barang antara Amerika Serikat dengan Korea Selatan pada tahun 2013-2014 seperti di bawah ini:

*Figure 4.1*  
*Volume of U.S. Imports from and Exports to South Korea during 2013–2014 and*

*the Size of the U.S. Trade Deficit with South Korea*

|                         | U.S. Imports       | U.S. Exports       | U.S. Trade Deficit |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2013                    | \$62,433.2 billion | \$41,686.6 billion | \$20,746.6 billion |
| 2014                    | \$69,518.4 billion | \$44,471.4 billion | \$25,047.1 billion |
| 2015 (through November) | \$66,440.7 billion | \$40,108.0 billion | \$26,332.7 billion |

*Source: Bureau, U. C. (2015). U.S. Census Bureau. Retrieved October 15, 2015, from U.S. Census Bureau Web site: <http://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5800.html>*

Pada Tanggal 8 Mei 2014, Senat Commerce, Science, and Transportation Committee hearing, dan Presiden U.S. Travel Association Roger Dow mencatat bahwa akan menambahkan Korea Selatan ke U.S. Visa Waiver Program pada tahun 2008 melihat jumlah warga Korea Selatan yang mengunjungi Amerika Serikat meningkat hingga 1,3 juta orang, pengeluaran mereka di Amerika Serikat meningkat 52 persen antara 2008 dan 2012 mencapai total US\$ 4,2 milyar, kemudian pengeluaran Korea Selatan di Amerika Negara selama 2012 mendukung 36.200 pekerjaan di Amerika Serikat, dan jasa perjalanan wisata menjadi yang faktor terbesar ke-5 Ekspor Amerika Serikat ke Korea Selatan, mewakili 7 persen dari total ekspor Amerika Serikat ke negara tersebut (Chapman, 2016). Kesaksian selama dengar pendapat ini juga menunjukkan bahwa memperluas Program Pelepasan Visa meningkatkan jumlah pengunjung Korea Selatan ke Hawaii dari 38.110 menjadi 171.506 orang antara 2008–2012 dengan pengeluaran mereka meningkat dari US\$ 79,4 juta menjadi \$ 314,6 juta antara tahun 2008–2013 (U.S. Congress, 2015).

Di samping keuntungan yang diperoleh dari hubungan bilateral Amerika Serikat dengan Korea Selatan sedang di tingkat yang bagus, Korea Utara melanjutkan perilaku mengancam dan provokatif di kawasan Asia-Pasifik melalui peluncuran misilnya dan Amerika Serikat sedang menggelar sistem pertahanan rudal yaitu THAAD kepada sekutu Korea Selatan untuk menghalangi Korea Utara. Barack Obama mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat telah bekerja sama untuk memperkuat aliansinya dengan Korea Selatan, dan untuk memastikan kesiapan terhadap ancaman apa pun. Sebagai contohnya hasil dari kerjasama pertahanan rudal yaitu THAAD yang merupakan sistem defensif murni untuk mencegah dan mempertahankan ancaman rudal Korea Utara.

Di hari itu, Barack Obama menegaskan kembali komitmen kuat Amerika Serikat untuk pertahanan dan keamanan Korea Selatan, termasuk pencegahan yang panjang, tidak tergoyahkan. Amerika Serikat dan Korea Selatan bersatu dalam mengutuk peluncuran rudal lanjutan Korea Utara ketika Tiongkok menjadi tuan rumah G-20. Program nuklir dan rudal Korea Utara kata Barack Obama, merupakan ancaman bagi bukan hanya Korea Selatan, tetapi juga bagi Jepang dan sekutu dan mitra Amerika Serikat lainnya di kawasan itu, serta ancaman bagi Amerika Serikat itu sendiri. Dari hal tersebut, tidak membuat Amerika Serikat mengendurkan kerjasamanya dengan Korea Selatan, ancaman tersebut di nilai sebagai suatu momen pembuktian tersendiri bagi Amerika Serikat.

Menurut William D. Coplin, menaksir kapasitas penggunaan kekuatan militer akan sulit, apabila kita tertarik untuk meramalkan akibat dari suatu konflik militer tertentu. Ada tiga kriteria dalam menilai kekuatan militer, yaitu jumlah pasukan, tingkat pelatihan, dan sifat perlengkapan militernya (Coplin, 2003). Dalam hal perlengkapan militer, ada perbedaan penting yang dimiliki oleh negara-negara yang memiliki kekuatan nuklir dengan yang tidak. Perlu di ingat bahwa nuklir memiliki daya penghancur yang besar dan ketidakmampuan negara-negara untuk menahan serangan nuklir menjadikan senjata nuklir sebagai aset militer yang besar. Dalam kasus ini, Barack Obama memandang bahwa program nuklir dan rudal Korea Utara merupakan ancaman yang tidak hanya pada Korea Selatan, tetapi juga bagi Jepang dan sekutu dan mitra Amerika Serikat lainnya di kawasan itu. Suatu negara apabila memiliki senjata nuklir serta sistem pengiriman nuklir yang efektif, dapat membuat negara tersebut memiliki kekuatan militer yang berbeda jauh besarnya dibandingkan dengan negara-negara yang tidak memilikinya (Coplin, 2003). Korea Utara yang memiliki senjata nuklir serta sistem pengiriman yang diperlukan, dapat membuat pasukan bersenjata yang jumlahnya relatif kecil, tetapi memiliki daya penghancur yang sangat besar. Dengan di pasangny sistem THAAD, Amerika Serikat bermaksud melindungi Korea Selatan secara total di masa itu. Latihan gabungan serta bantuan peralatan militer menjadi bukti lain Amerika Serikat menaruh perhatian besar terhadap konflik tersebut. Park Geun-hye mengatakan bahwa aliansi Amerika Serikat dengan Korea Selatan telah memainkan peran penting untuk perdamaian dan stabilitas tidak hanya di Semenanjung Korea, tetapi seluruh wilayah (House, 2016).

Park Geun-hye yang hadir pada pertemuan G-20 mengatakan bahwa uji coba nuklir Korea Utara pada beberapa tahun terakhir serta peluncuran misil yang berkelanjutan secara fundamental mengancam keamanan Semenanjung Korea dan Asia Timur Laut (House, 2016). Park Geun-hye juga menambahkan bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikatakan menanggapi dengan tegas setiap provokasi oleh Korea Utara dengan menggunakan semua

cara. Park Geun-hye mengatakan dia dan Barack Obama telah setuju untuk mempertahankan sikap pencegahan yang kuat dengan meningkatkan kemampuan pertahanan gabungan kedua negara untuk memasukkan penyebaran sistem THAAD. Amerika Serikat dan Korea Selatan telah setuju untuk menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara, dan lebih lanjut memperkuat upaya untuk menutup celah dalam pertemuannya di G-20 Summit. Tidak hanya soal ancaman Korea Utara, Amerika dan Korea Selatan telah setuju untuk tidak hanya memperluas kerjasama di perbatasan baru seperti kesehatan global, perubahan iklim dan ruang angkasa, tetapi juga memperluas peran kedua negara di berbagai bidang seperti pengungsi, operasi pemeliharaan perdamaian dan kerjasama pembangunan.

Menurut Rostow, petualangan-petualangan di luar negeri diperlukan agar memperoleh dukungan di dalam negeri, yang dimana pada saat kemajuan ekonomi menimbulkan kerusuhan (Coplin, 2003). Dalam kasus ini, Amerika Serikat dengan Korea Selatan mendapat dukungan dari warga negara dari masing-masing negara karena adanya gertakan dari Korea Utara dengan senjata pemusnah masal miliknya. Adanya musuh bersama di saat itu menjadikan Amerika Serikat memiliki kesempatan untuk mendesak Korea Selatan untuk segera mengesahkan KORUS FTA. Tindakan tersebut diperlukan mengingat walau Barack Obama telah di beri izin untuk pengesahan KORUS FTA, akan tetapi sebagian dari Kongres tidak menyetujuinya karena di nilai akan menghancurkan 159.000 lapangan pekerjaan di Amerika Serikat belum di tahun tersebut angka pengangguran dan kemiskinan semakin naik (Goldfarb & Montgomery, 2011).

Dari ketidaksetujuan Kongres terhadap efek yang ditimbulkan oleh perjanjian tersebut, Barack Obama meyakinkan Kongres bahwa justru dengan KORUS FTA Korea Selatan memiliki potensi untuk menciptakan sebanyak 280.000 pekerjaan untuk Amerika Serikat, juga menurut penilaian baru-baru ini oleh staf Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat, KORUS FTA juga berpotensi meningkatkan ekspor lebih dari US\$ 12 milyar (Goldfarb & Montgomery, 2011). Dari hal tersebut, Barack Obama memperoleh persetujuan dari Kongres dan secara meyakinkan akan membantu pelaksanaan kesepakatan tersebut. Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menghilangkan dua kendala signifikan dalam ratifikasi KORUS FTA, yaitu pembatasan Korea Selatan atas impor mobil dan daging sapi untuk meratifikasi perjanjian. Perwakilan dari Amerika Serikat, Ron Kirk mengatakan dia berencana untuk segera memulai pembicaraan dengan mitra, Menteri Perdagangan Korea Selatan Kim Jong-hoon, tetapi juga berjanji untuk berkonsultasi dengan Kongres dalam melakukan negosiasi (Chan & Calmes, 2010).

KORUS FTA memiliki beberapa manfaat yang diperoleh Amerika Serikat apabila perjanjian tersebut direalisasikan, antara lain:

- 1) KORUS FTA akan menguntungkan ekonomi Amerika Serikat dan menciptakan lapangan pekerjaan baru yang juga akan membuka akses baru untuk barang dan layanan Amerika Serikat di Korea Selatan senilai US\$ 1 triliun dalam hitungan ekonomi, dan dengan membangun lapangan kerja yang seimbang di Korea Selatan untuk pekerja dan pengembangan bisnis Amerika Serikat agar dapat bersaing.
- 2) Hampir dua pertiga dari ekspor pertanian Amerika Serikat ke Korea Selatan saat itu akan menjadi bebas biaya; menyajikan petani, peternak, dan pengolah makanan Amerika Serikat, peluang terobosan untuk memperluas penjualan di Korea Selatan dapat terealisasi.
- 3) Korea Selatan akan menerapkan dengan jelas, konsisten, dan teratur prosedur pembuatan aturan di seluruh sektor ekonominya menjamin adil dan terbukanya proses pengaturan untuk produsen Amerika Serikat, petani, dan penyedia layanan yang menjalankan bisnis di sana.
- 4) Mempermudah dan mempercepat prosedur bisnis Amerika Serikat agar dapat menjangkau pelanggan di Korea Selatan lebih cepat dan dengan sedikit pita merah (Council, 2016).

Mulai dari disepakatinya KORUS FTA, Barack Obama secara bertahap mengirimkan peralatan militer ke Korea Selatan karena dari kesepakatan dagang tersebut, Korea Selatan tidak akan memiliki kesulitan dalam membeli barang-barang tersebut dari Amerika Serikat. Di samping itu, peningkatan alusista di Korea Selatan diperlukan mengingat pengujian senjata pemusnah massal milik Korea Utara yang semakin sering. Kenyataan bahwa Korea Utara melebihi di hampir setiap bidang perang konvensional dibandingkan dengan Korea Selatan dan hampir selalu diekspresikan dalam bentuk hujan rudal hasil percobaan peralatan militernya di Korea Utara. Korea Utara memiliki setidaknya 21.000 artileri, dan diyakini ditargetkan ke ibukota Korea Selatan, Seoul (Blair, 2015). Angkatan bersenjata Korea Selatan yang jauh lebih kecil, sebaliknya, mendapat bantuan dari beberapa senjata dan peralatan terbaik yang dipasok Amerika, termasuk lebih dari 2.000 tank dan ratusan jet tempur F5, F15, dan F16 serta pesawat pembom. Lebih penting lagi, ia berada di bawah payung keamanan Amerika Serikat, dan ada 28.500 pasukan Amerika Serikat yang secara permanen berbasis di Korea Selatan (Blair, 2015).

Dengan bantuan dari Amerika Serikat berupa THAAD, pesawat jet tempur yang baru, serta pelatan-pelatan militer terbaru yang lain membuat Barack Obama menarik sebagian pasukan Amerika Serikat yang sedang melakukan latihan gabungan dengan pasukan Korea Selatan dan menetapkan pasukan yang ada di Korea Selatan

tetap berjumlah 28.500 orang sebagai bentuk komitmen Amerika Serikat terhadap Korea Selatan selalu negara sahabat seperjuangan. Penarikan sebagian pasukan tidak berarti memperlemah aliansi antara Amerika Serikat dengan Korea Selatan. Korea Selatan masih dapat berpartisipasi dalam pelatihan militer, mengerahkan pasukan internasional, dan mengoordinasikan kebijakan dengan sekutu-sekutunya dan pasukan Amerika Serikat dapat berada di Korea Selatan pada saat itu jika Korea Utara menyerang lagi. Korea Selatan akan tetap membutuhkan konsensus internasional yang kuat untuk menghadapi Korea Utara, tetapi ini adalah pertandingan Korea Selatan untuk dimainkan, dan Korea Selatan harus berada di barisan depan (Urquhart, 2015).

Ada 3 kriteria dalam mengukur kekuatan militer suatu negara yang terdiri dari jumlah pasukan, tingkat pelatihan, dan sifat perlengkapan militernya (Coplin, 2003). Korea Selatan menerima bantuan peralatan serta pelatihan pasukan militer dari Amerika Serikat karena bila dibandingkan dengan Korea Utara, Korea Selatan kalah jauh dalam kekuatan militernya. Park Geun-hye selaku Presiden Korea Selatan pada waktu itu menaruh perhatian untuk bergabung dalam sesi Kongres pada rapat Sidang Komite Hubungan Luar Negeri Senat pada tanggal 4 Maret 2014 guna membahas KORUS FTA yang pada awal rencana akan ditandatangani pada tahun 2012 (Chapman, 2016). Korea Selatan yang pada waktu itu menaruh perhatian pada kemitraan Trans-Pasific, setuju untuk berbagi biaya pertahanan dengan Amerika Serikat terutama membiayai pasukan Amerika Serikat yang bertugas di Korea Selatan. Salah satu bentuk kerjasama nyata dari Korea Selatan adalah kerjasama di bidang energi dan pengiriman pasukan Korea Selatan ke Afghanistan untuk membantu pasukan Amerika Serikat di sana.

Dengan penarikan sebagian pasukan dari Korea Selatan merupakan salah satu tindakan dari Barack Obama dimana akan mengganti arah hubungan bilateral Amerika Serikat dengan Korea Selatan dari militer menjadi ekonomi dengan KORUS FTA. Amerika Serikat menilai Korea Selatan lebih dari siap untuk menjaga diri dari Korea Utara tetapi bukan berarti Amerika Serikat lepas tangan sepenuhnya. Dan dengan diberlakukannya KORUS FTA, Korea Selatan akan memperoleh keuntungan dalam membeli peralatan militer Amerika Serikat.

### **C. International Context**

Di dalam politik Internasional, situasinya selalu dipenuhi dengan anarki yang berarti suatu negara selalu bersaing dan mendominasi negara lain agar dapat bertahan hidup di lingkungan global tersebut. Situasi seperti itu dianggap oleh para orang Realis sebagai konsep Balance of Power. Menurut Morgenthau, konsep Balance of Power pada dasarnya bersifat dinamis dan selalu berubah yang berarti keseimbangan tidak hanya akan selamanya

sama dan tetap, tetapi juga sejak awal kekuasaan yang bertambah pada suatu negara juga terus berkembang serta dapat menjadi berbahaya dan mengancam (Morgenthau, 2010). Teori maupun konsep mengenai perilaku negara yang menitikberatkan konteks geografis bukanlah suatu gejala baru. Hal tersebut karena pada abad ke-4 seorang filsuf India, Kautilya membahas hal tersebut dengan membayangkan beberapa negara membentuk suatu sistem tata surya politik, dan cenderung saling bergravitasi sebagai sahabat atau bertabrakan sebagai musuh sesuai dengan posisi masing-masing dalam lingkaran tersebut. Sehingga, negara-negara yang saling berbatasan, karena sesuai dengan sifatnya akan memiliki banyak sekali titik gesek harus dianggap musuh alami (Russell, 1936).

Dengan asumsi bahwa negara-negara akan berusaha memperluas wilayahnya, Kautilya berargumentasi bahwa negara-negara yang bertetangga akan selalu menjadi musuh, dan tetangganya tetangga akan menjadi sahabat. Dalam kasus ini, Amerika Serikat dalam tindakannya menentang Korea Utara, memiliki kepentingan lain yaitu memperkuat pengaruhnya di wilayah Asia Timur. Seperti yang sudah diketahui bahwa antara Korea Selatan dengan Jepang masih memiliki ketegangan sampai sekarang karena kejadian masa lalu. Dan karena adanya ancaman senjata pemusnah massal dan percobaan senjata dari Korea Utara, Amerika Serikat memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk menggabungkan Korea Selatan dan Jepang atas dasar musuh bersama yang dapat mengancam wilayah mereka. Salah satu tindakan Barack Obama yang menjadi salah satu pencapaiannya adalah Pivot to Asia dimana Amerika Serikat turut membantu menciptakan keseimbangan di wilayah Asia.

Sejak lama, diplomasi Amerika di Asia telah menjadi suatu yang tidak di sengaja karena sering diterpa oleh tantangan yang lebih mendesak seperti hak asasi manusia atau terorisme. "Penyeimbangan" nyata Barack Obama adalah antara Asia Timur dan Asia Tenggara. Amerika Serikat bergabung dengan KTT Asia Timur, yang diselenggarakan oleh ASEAN, dan juga mendirikan KTT ASEAN sendiri. Sejak tahun 2009, hubungan Amerika Serikat telah membaik dengan setiap negara di ASEAN selain Thailand (Green, 2016). Tindakan Barack Obama bisa di bilang bukan sesuatu yang baru karena Presiden Amerika Serikat sudah pernah melakukan hal tersebut. Akan tetapi, di saat adanya kerusuhan di Korea Utara, Barack Obama dapat menyatukan wilayah Asia terutama Asia Timur agar menghadapi masalah tersebut. Dan situasi ini juga menjadi kesempatan untuk menjaga pengaruh Amerika Serikat di Asia.